

BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Kota Cirebon sebagai aktor subnasional yang diberikan otonomi daerah dan wewenang dari pemerintah pusat untuk mengelola wilayah di bagian negara Indonesia mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan. Konteks pembangunan berkelanjutan yang diangkat pada penelitian ini terdapat pada kapasitas pemenuhan pembangunan kota berkelanjutan oleh Pemerintah Kota Cirebon. Pembangunan kota berkelanjutan tersebut secara spesifik disoroti pada bidang lingkungan, yang mana meskipun Kota Cirebon telah mengupayakan ekstra melalui ProKlim dan Plastik Sulit, tetap muncul masalah pada IKLH yang belum sesuai dengan regulasi, serta inventarisasi emisi gas rumah kaca yang tidak konsisten setiap tahun dilakukan dan data angka emisi gas rumah kaca yang hanya meliputi sektor limbah dari seharusnya juga meliputi sektor IPPU, AFOLU, dan energi.

Lalu terdapat juga masalah pada pengelolaan sampah yang belum terlaksana secara terpadu dan sesuai dengan regulasi. Hal ini mengakibatkan data volume sampah yang tercatat tidak terperinci dalam setiap proses pengolahan sampah dari hulu ke hilir, sehingga dapat diartikan bahwa angka 155,66 m³/hari sebagai selisih dari total volume sampah dan sampah yang sampai ke TPA. Selanjutnya terdapat masalah pada risiko bencana alam, yang mana menunjukkan bahwa banjir masuk ke dalam risiko tinggi dan menyumbangkan indeks risiko bencana Kota Cirebon menjadi yang paling tinggi di antara *pilot city* lainnya, yaitu 172,76.

Melalui temuan masalah perkotaan tersebut, UCLG-ASPAC menjadikan Kota Cirebon sebagai salah satu tempat penyelenggaraan program CRIC. Hal ini juga didukung oleh komitmen Pemerintah Kota Cirebon untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pembangunan kota berkelanjutan. Setelah melalui proses pelatihan dan asistensi teknis yang

dilakukan sebagai kegiatan utama dari program CRIC, dihasilkan suatu kajian akademis berdasarkan skoring prioritas melalui kajian metodologi ilmiah berbentuk rencana aksi iklim yang menghasilkan fokus pada sektor limbah, terutama persampahan.

Melalui analisis berdasarkan hipotesis penelitian yang diekstrak dari teori analisis *demand-driven theory inter-agency cooperation*, berikut hasil analisis jenis peranan UCLG-ASPAC pada Kota Cirebon:

Tabel 6.1. Tabel simpulan

Peran Pendanaan	Peran pendanaan memiliki kriteria pada motif aktor subnasional penerima dana yang mengalami pemotongan anggaran dari pemerintah pusatnya dan aksi peranan yang dilakukan oleh pemberi dana pun mengharuskan adanya <i>transfer</i> dana langsung kepada penerima. Hipotesis tersebut tidak bekerja karena Kota Cirebon tidak dideskripsikan pada kasus ini mengalami pemotongan anggaran dari Indonesia untuk pengendalian lingkungan hidup. Selain itu, UCLG-ASPAC juga tidak melakukan <i>transfer</i> dana secara langsung, sehingga dapat disimpulkan bahwa UCLG-ASPAC tidak memiliki peran pendanaan karena bukan pemberi dana untuk Kota Cirebon dan Kota Cirebon tidak menerima dana langsung dari UCLG-ASPAC melalui program CRIC pada studi kasus penelitian ini.
Peran Bantuan Teknis	Peran bantuan teknis memiliki kriteria motif aktor pemberi bantuan teknis adalah aktor yang mumpuni dalam suatu bidang dan berkepentingan untuk mencitrakan dirinya sebagai ahli dalam bidang tersebut agar diakui eksistensinya. Sedangkan aktor penerima bantuan teknis adalah aktor yang memiliki kekurangan dalam keahlian tersebut dan tertekan secara kondisi untuk dapat memenuhi kewajibannya, sehingga secara naluriah akan menerima bantuan teknis yang ditawarkan oleh aktor pemberi bantuan teknis. Dalam temuan penelitian ini, menunjukkan bahwa aktor UCLG-ASPAC sebagai organisasi <i>trans-government</i> memiliki

	kepentingan untuk mempromosikan agenda organisasinya dalam pendukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui program CRIC yang merupakan bagian dari inisiatif iklim dari UCLG-ASPAC, sehingga organisasi UCLG-ASPAC dapat menunjukkan fungsinya sebagai penaung pemerintah-pemerintah daerah di kawasan Asia-Pasifik. Peranan tersebut diwujudkan dalam pelatihan dan asistensi teknis untuk pekerja Pemerintah Kota Cirebon, sehingga mampu membuat rencana aksi iklim yang metodologis dan ilmiah sebagai bekal pembuatan perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD, Renstra, dan turunannya untuk memenuhi tanggung jawab otonomi daerah serta mandat pengendalian lingkungan hidup aktor subnasional Kota Cirebon. Di samping itu, Kota Cirebon yang memiliki beban tanggung jawab pengendalian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan terkendala secara teknis seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sehingga mendorong Kota Cirebon melalui skema komitmen resmi program CRIC dan tindak lanjut CAP untuk menerima program CRIC, serta mengikutinya agar dapat meningkatkan kemampuan perencanaan aksi iklim yang implementatif terhadap perencanaan pembangunan daerah.
Peran <i>Advanced Program</i>	Peran <i>advanced program</i> memiliki kriteria bahwa aktor yang menjalin hubungan harus mempunyai kedudukan sama dan kesetaraan secara identitas sebagai aktor hubungan internasional serta kemampuan, sehingga mencapai tujuan yang sama melalui satu formulasi <i>advanced program</i>. Analisis penelitian ini menunjukkan bahwa UCLG-ASPAC secara entitas adalah organisasi <i>trans-government</i>, sedangkan Kota Cirebon adalah aktor subnasional yang menggugurkan kriteria identitas aktor hubungan internasional pada teori ini. Selain itu, UCLG-ASPAC memiliki kepentingan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sebagai salah satu fungsi organisasi, yang mana menghasilkan program CRIC, sedangkan Kota

	Cirebon berkepentingan memenuhi tanggung jawab dari pemerintah pusat, sehingga program CRIC tidak lahir dari kesamaan kedudukan dan kesetaraan kemampuan, serta tidak dapat bekerja untuk mendeskripsikan jenis peranan UCLG-ASPAC pada Pemerintah Kota Cirebon melalui program CRIC.
--	---

Oleh karena itu, program CRIC adalah bentuk dukungan bantuan teknis untuk Pemerintah Kota Cirebon dalam rangka pencapaian pembangunan berkelanjutan. UCLG-ASPAC sebagai organisasi *trans-government* di kawasan Asia Pasifik dalam hal ini, berperan sebagai pemberi bantuan teknis melalui implementasi program CRIC di Kota Cirebon. Melalui penyelenggaraan program CRIC tersebut, Kota Cirebon mendapatkan manfaat berupa pelatihan dan asistensi teknis dalam pengkajian adaptasi perubahan iklim dan mitigasi perubahan iklim yang menghasilkan rencana aksi perubahan iklim sebagai kajian ilmiah pendukung perencanaan pembangunan daerah Kota Cirebon.

6.2. Rekomendasi

Dalam penulisan laporan penelitian ini, penulis memahami bahwa hasil dari penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga berikut ini adalah rekomendasi akademis dan praktis untuk hasil penelitian ini:

6.2.1. Rekomendasi Akademis

Terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan untuk menyempurnakan dan melengkapi penelitian penulis sebagai berikut:

1. Penelitian program inisiatif iklim UCLG-ASPAC lainnya

Penelitian penulis dibatasi oleh studi kasus program CRIC yang merupakan salah satu dari 4 portofolio proyek UCLG-ASPAC lainnya dalam inisiatif iklim. 3 proyek UCLG-ASPAC lainnya adalah Urban-Act, International Urban Cooperation (IUC), dan Global Covenant of Mayors (GCoM). Maka dari itu, Urban-Act, IUC, dan GCoM memungkinkan dapat dikaji dengan studi hubungan internasional guna memperkaya khasanah

keilmuan dalam topik aktor institusi internasional, paradiplomasi, maupun topik kontemporer seperti pembangunan berkelanjutan dan lingkungan.

2. Penelitian program CRIC di *pilot city* lainnya

Program CRIC yang diteliti dalam penelitian ini terbatas pada program CRIC yang dilaksanakan di Kota Cirebon. Kota Cirebon merupakan salah satu dari 10 *pilot city* yang ada di Indonesia. Maka dari itu, terdapat Bandar Lampung, Banjarmasin, Gorontalo, Kupang, Mataram, Pangkalpinang, Pekanbaru, Samarinda, dan Ternate sebagai *pilot city* CRIC lainnya yang dapat diteliti lebih lanjut.

3. Pengembangan teori analisis *demand-driven theory of inter-agency cooperation*

Penelitian penulis menggunakan teori analisis *demand-driven theory of inter-agency cooperation*. Teori ini memiliki fungsi untuk menganalisis fenomena kerja sama transnasional dan hubungan transnasional. Dengan batasan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai salah satu percontohan operasionalisasi teori analisis tersebut, teori *demand-driven theory of inter-agency cooperation* dapat digunakan pada studi kasus yang memiliki kesamaan topik pada penelitian ini maupun dikembangkan agar dapat dioperasikan ke dalam kasus-kasus yang lebih rumit.

4. Eksplorasi objek penelitian

Penelitian ini secara garis besar merupakan penelitian yang menjadikan peran UCLG-ASPAC sebagai objek penelitian. Melalui pemaparan topik di awal hingga sampai analisis akhir, terdapat aktor-aktor lain yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian, seperti kota tempat penyelenggaraan program,

keterlibatan kementerian-kementerian sebagai perwujudan Pemerintah Indonesia, dan aktor-aktor lainnya yang tersebut dalam penelitian ini.

6.2.2. Rekomendasi Praktis

Setelah melakukan penelitian ini, penulis menemukan hal-hal yang masih terdapat ruang untuk dikembangkan atau ditingkatkan oleh para pemangku kepentingan yang secara praktik terlibat dalam berjalannya fenomena ini sebagai berikut:

1. Peningkatan skala bantuan

Dalam penelitian ini, program CRIC terbatas pada bantuan teknis yang berwujud pelatihan dan asistensi teknis dalam pembuatan rencana aksi iklim. Namun, hal tersebut merupakan ruang yang terlalu terbatas bagi UCLG-ASPAC untuk membantu Kota Cirebon dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai aktor subnasional dan pengendalian lingkungan hidup. Maka dari itu, untuk meningkatkan potensi kebermanfaatan bagi perencanaan pembangunan Kota Cirebon, bantuan-bantuan yang lebih dalam seperti penyesuaian RPJMD langsung untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan opsi penyaluran dana langsung dari donor-donor internasional dapat mempercepat pencapaian target dimaksud serta pemenuhan tanggung jawab aktor subnasional.

2. Peningkatan keterbukaan terhadap tingkat kebermanfaatan

Potensi peningkatan manfaat bagi Pemerintah Kota Cirebon dapat terbuka ketika terdapat dukungan secara politik maupun regulasi untuk membuka Kota Cirebon agar memaksimalkan opsi bantuan internasional dan kewenangan khusus untuk menyelenggarakan pembangunan dibantu oleh institusi-institusi non-negara. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan dalam otonomi daerah juga membuat institusi non-negara seperti

UCLG-ASPAC membatasi bantuannya dalam bentuk bantuan teknis, jika merujuk pada program CRIC. Maka dari itu, di samping kebutuhan akan bantuan lebih sebagai faktor eksternal, dari faktor internalnya tersendiri, Kota Cirebon membutuhkan keterbukaan secara regulasi dan politik untuk mendorong pembangunan kota berkelanjutan di wilayahnya.

3. Peningkatan substansi program kerja sama

Melalui program CRIC, Kota Cirebon memfokuskan masalahnya pada penanganan persampahan di samping masalah-masalah lainnya yang sama krusialnya dengan persampahan. Seperti masalah emisi gas rumah kaca (kekurangan energi, IPPU, dan AFOLU), pendangkalan sungai, pemukiman ilegal, vegetasi bakau, dan pengendalian bencana perlu mendapatkan perhatian serta peningkatan kapasitas penanganan Pemerintah Kota Cirebon untuk masalah dimaksud.